

SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015 - 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

6.Undang.....

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daeah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015 -
2025.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Perwilayah....

11. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah
12. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antarkawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
13. Kawasan pembangunan pariwisata daerah selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

18. Industri.....

18. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. *Meeting, incentive, conference, and exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
22. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
23. Standardisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

26. Sertifikat.....

26. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2012-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARDA Tahun 2012-2025:
- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup RIPPARDA Tahun 2015 – 2025 meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN

Bagian

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan daerah pada tahun 2025 Terwujudnya Daerah sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia yang Berdaya Saing Tinggi, Berkelanjutan, serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Kedua

Misi

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata daerah yang aman, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata daerah yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ;
- c. Mengembangkan industri pariwisata di daerah yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Mengembangkan kelembagaan pariwisata (organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber daya manusia) yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a.Meningkatkan....

- a. Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi Pariwisata daerah dan dampaknya bagi pengembangan wilayah setempat;
- b. Memperkuat citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang unggul dan bermartabat yang akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan pembelanjaan wisatawan baik wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke daerah;
- c. Meningkatkan rantai nilai pariwisata untuk peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di daerah;
- d. Meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata yang efektif dan profesional.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata daerah.
 - b. Berkembangnya daya tarik wisata melalui perintisan, pembangunan, pemeliharaan, dan revitalisasi daya tarik wisata.
 - c. Meningkatnya konektivitas, kemudahan dan kenyamanan berwisata melalui pengembangan akses, sarana prasarana dan fasilitas pariwisata di daerah
 - d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat setempat melalui berbagai program pemberdayaan dan kemitraan usaha pariwisata
 - e. Meningkatnya daya saing brand pariwisata Daerah baik dalam konteks nasional, regional dan internasional melalui strategi komunikasi pemasaran yang efektif.
 - f. Meningkatnya kesadaran dan ketertarikan wisman dan wisnus pada destinasi-destinasi pariwisata di Indonesia, dengan tolok ukur meningkatnya: Kedatangan wisatawan (*arrival*), Lama tinggal wisatawan (*length of stay*) dan Tingkat pembelanjaan (*spending*)
 - g. Meningkatnya.....

- g. Meningkatnya daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata melalui sertifikasi usaha.
 - h. Meningkatnya kapasitas industri pariwisata melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan kapasitas usaha kepariwisataan.
 - i. Meningkatnya daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar kompetensi Sumber daya manusia di bidang pariwisata
 - j. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan destinasi pariwisata di daerah
- (2) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya - upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata daerah;
- c. pembangunan daya tarik wisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata;
- e. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata
- f. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- g. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah adalah pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah

Pasal 12

(1) Kawasan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;

c.memiliki.....

- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 13

Pembangunan perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 14

Perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam 11 Pasal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan kawasan pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 15.....

Pasal 15

Pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah dilakukan melalui pengembangan ruang-ruang wisata tematis dalam tata hubungan yang sinergis, komplementer dan terpadu untuk meningkatkan diversifikasi produk wisata dan daya saing pariwisata daerah

Pasal 16

Strategi untuk perencanaan pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Menyusun rencana pengembangan Ruang-ruang Wisata/ Sub-sub Kawasan Wisata Tematis yang terpadu sebagai KPPD di Daerah; dan
- b. Menyusun rencana pengelolaan dan regulasi pembangunan KPPD.

Bagian Keempat

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi:
 - a. pengembangan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan daerah
 - b. pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu antar ruang pariwisata berkembang di daerah;
 - c. penguatan pelestarian sumber daya wisata di daerah; dan
 - d. pengendalian dan penataan lingkungan di daerah dalam mendukung kualitas daya tarik wisata.

Pasal 18.....

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan daya tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan keragaman dan kualitas daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata berbasis alam budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even di KPPD untuk mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata setempat;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata berbasis alam budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan *event* untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan
 - c. Pemantapan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
- (2) Strategi untuk pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pengembangan dan penguatan hubungan - keterkaitan (*linkage*) serta keterpaduan pengemasan pariwisata antar potensi ruang pariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian dan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi :

a.Peningkatan.....

- a. Peningkatan Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat;
- b. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan/ pengembangan kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan perkembangan destinasi pariwisata daerah;
- c. Pengembangan dan Penerapan Perangkat Hukum dan Perangkat Pengaturan Teknis Pengembangan Sub-sub Kawasan Wisata daerah; dan
- d. Penguatan Kepedulian dan Pemahaman Masyarakat Luas Terhadap Rencana Pengembangan dan Penataan daya tarik wisata.

Pasal 20

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas dan/ atau Transportasi Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- b. pengembangan dan pemantapan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan dan pengembangan kepariwisataan kawasan;

Pasal 22

(1) Strategi pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata dalam pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

a.pengembangan.....

- a. pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi darat, angkutan penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara dalam memperkuat konektivitas antara pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata;
 - b. pengembangan dan Peningkatan Kemudahan pergantian moda untuk mendukung kemudahan kunjungan dan pergerakan wisatawan di daerah; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di daerah.
- (2) Strategi aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata dalam pengembangan dan pemantapan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan ketersediaan, kapasitas, keamanan dan kenyamanan moda transportasi dalam meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan; dan
 - b. pengembangan dan pemantapan kemudahan akses informasi, reservasi dan keterpaduan layanan moda transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan.

Pasal 23

Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dalam pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a.pembangunan.....

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung; dan
- d. pengembangan fasilitas pariwisata (pusat informasi wisata, akomodasi, rumah makan, pusat cinderamata) untuk mendukung pertumbuhan kegiatan wisata dan kelancaran aktifitas wisatawan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. penyiapan dan peningkatan prasarana umum di daerah;
 - b. pengembangan prasarana telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah; dan
 - c. mengembangkan sarana transportasi udara sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. pengembangan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pengembangan.....

- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (*difable*).
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di daerah.
 - (4) Strategi untuk pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan melalui perencanaan, pengembangan dan penetapan regulasi dalam rangka pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung kepariwisataan.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 26

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan.
- d. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

a.meningkatkan...

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
 - b. inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui Mengembangkan usaha produktif di bidang pariwisata untuk peningkatan sumber daya lokal di daerah.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui mengembangkan rantai nilai usaha masyarakat di bidang kepariwisataan di daerah.
- (4) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- c. peningkatan.....

- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
- d. perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing disektor pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem birokrasi perijinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata;
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan

c.mengembangkan.....

- c. mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal di bidang pariwisata.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

Arah kebijakan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan pasar, citra pariwisata dan kemitraan pemasaran dilakukan melalui:

- a. pengembangan segmen pasar utama dan potensial :
- b. pemantapan segmen domestik (*high – mid – low*);
- c. pengembangan citra dan positioning; dan
- d. penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata dalam dan luar negeri.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan pasar utama dan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, melalui:
 - a. intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar-pasar utama;
 - b. promosi di pasar-pasar potensial;
 - c. pengembangan *co-marketing* dengan *travel related industries* yang menjual paket *outbound* ke daerah;
 - d. pengembangan dan penguatan market *research* untuk pasar utama dan pasar potensial;
 - e. pengembangan pemasaran pada destinasi tematik untuk segmen *niche market*; dan
 - f. promosi dan publikasi untuk kelompok segmen *special interest*.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar utama dan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan pemasaran pada destinasi tematik untuk segmen *mass tourism* (domestik) :
 1. daerah *culture paradise*;

2.daerah.....

2. daerah *seafood paradise*;
 3. daerah *souvenir paradise*;
 4. daerah *rest area, waterboom*.
- b. publikasi dalam rangka meningkatkan *awareness* : sadar wisata; dan
 - c. pemberian insentif khusus untuk pasar wisatawan domestik;.
- (3) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :
- a. intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan brand "*Bintan Breathtaking Journey*"; dan
 - b. media *campaign* sebagai strategi memantapkan *positioning* daerah sebagai destinasi wisata yang spesifik;
- (4) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi :
- a. Intensifikasi publikasi dan promosi dengan memanfaatkan brand "*Bintan Breathtaking Journey*"; dan
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata regional.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. penguatan struktur usaha pariwisata;
- b. penguatan kemitraan usaha pariwisata;
- c. peningkatan daya saing produk; dan
- d. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- e. penciptaan kredibilitas bisnis.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata di daerah.

(2)Stategi.....

- (2) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui meningkatkan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata di daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan di daerah; dan
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya di daerah.
- (5) Strategi untuk Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi:

a.pengembangan....

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta di daerah;
- b. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- c. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang kepariwisataan.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *public-private partnership (ppp)/ good tourism governance*; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (3) Strategi untuk peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pelaku di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
 - a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat daerah; dan
 - b. optimalisasi koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi Sumber Daya Manusia lembaga pemerintahan daerah;
- b. sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata di daerah;
- c. standarisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan; dan
- d. optimalisasi peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata

Pasal 38

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi Sumber Daya Manusia lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan melalui optimalisasi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lembaga pemerintahan Daerah.
- (2) Strategi untuk sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, meliputi:
 - a. optimalisasi sumber daya manusia kepariwisataan di Daerah;
 - b. sertifikasi profesi tenaga pendidik; dan
 - c. akselerasi kualitas tenaga pendidik kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk standarisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengoptimalkan institusi pendidikan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilakukan melalui meningkatkan peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2015 - 2025 dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh SKPD/lembaga terkait lainnya dan pemerintah daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Jangka waktu RIPPARDA tahun 2015- 2025 adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan, RIPPARDA tahun 2015-2025 dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj.BUPATI BINTAN
ttd

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 4



NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2015

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH
TAHUN 2015 – 2025

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan - kawasan dunia lainnya

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARDA Kabupaten akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPARDA Kabupaten secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan - kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARDA Kabupaten ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang

Sangat.....

sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARDA Kabupaten diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA Kabupaten sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/ wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 4.

Penjelasan dari visi terwujudnya Daerah sebagai *Destinasi Wisata Berkelas Dunia yang Berdaya Saing Tinggi, Berkelanjutan, serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* adalah

- a. Mewujudkan Destinasi Pariwisata BERKELAS DUNIA, berarti harus mengembangkan destinasi pariwisata yang:
 1. Memiliki keunikan dan kekhasan dengan karakter dan kearifan lokal (*local genuine*) yang bercita rasa internasional;
 2. Memiliki layanan yang memenuhi standar internasional;
 3. Mampu menarik wisatawan mancanegara dan nusantara untuk datang berkunjung;
 4. Memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi wisatawan;
 5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa di dunia dan menjadi kebanggaan nasional.
- b. Destinasi Pariwisata BERDAYA SAING, dimaksudkan sebagai kemampuan relatif suatu destinasi pariwisata dibandingkan dengan destinasi-destinasi pariwisata pesaingnya di tingkat internasional untuk memenuhi kebutuhan, menjadi pilihan dan menarik calon wisatawan untuk datang berwisata. Kemampuan ini ditentukan oleh faktor spesifik pariwisata yaitu atraksi atau daya tarik, dan faktor umum yaitu meliputi sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung.

c. Destinasi....

- c. Destinasi Pariwisata BERKELANJUTAN, harus menjadi prinsip dasar yang dianut. Prinsip pengembangan destinasi pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan bertumpu kepada 4 (empat) aspek utama, yaitu:
1. Keberlangsungan lingkungan (*Environmentally Sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata nasional yang ramah lingkungan dan mampu menjaga, melindungi dan melestarikan kekayaan alam (konservasi dan proteksi lingkungan);
 2. Keberlangsungan sosial budaya (*Socially Culture Sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas dari nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Termasuk di dalamnya upaya mitigasi terhadap dampak negatif yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya;
 3. Keberlangsungan ekonomi (*Economically Sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata nasional harus mampu menjaga kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan dan menyediakan peluang usaha dan lapangan kerja;
 4. Keberlangsungan kelembagaan (*Institutionally Sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata nasional harus mampu mengembangkan kerjasama institusi, kemitraan yang kreatif, produktif dan saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
- d. Mendorong PEMBANGUNAN DAERAH, dalam konteks visi tersebut diartikan sebagai pengembangan destinasi berbasis potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) tinggi dan mampu menggerakkan mata rantai pembangunan di daerah tersebut.
- e. Destinasi Pariwisata PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, mengamanatkan adanya upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan dan peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Masyarakat bukan merupakan objek tetapi harus diposisikan menjadi subjek dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional agar masyarakat memperoleh nilai manfaat (baik ekonomi, sosial dan budaya) yang besar sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat sejalan dengan perkembangan destinasi pariwisata. Selain itu kearifan yang dimiliki masyarakat akan memperkuat daya saing suatu destinasi.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Cukup jelas

Pasal 15.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Trikora, Pantai Sakera dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Hutan Gunung Daerah dan sebagainya.

b)perairan.....

- b) perairan sungai dan danau, contoh: Danau Biru dan sebagainya.
- c) Pertanian dan perkebunan, contoh: agro wisata nanas dan sebagainya.
- d) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Kawasan eks tambang dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - 1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya
 - 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5)kawasan.....

- 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung Pecinan Kijang, Desa Wisata Sri Daerah dan sebagainya.
 - c) Museum, contoh: Museum bahari dan sebagainya.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat
 - b) Kesenian, contoh: tari Malemang, kesenian Makyong dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan (Mini Zoo).
2. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan Lagoi dan area olahraga lainnya.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata petualangan (*adventure tourism*);
2. wisata bahari (*marine tourism*);
3. wisata agro (*farm tourism*);
4. wisata kreatif (*creative tourism*);
5. wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
6. wisata kuliner (*culinary tourism*);
7. wisata budaya (*cultural tourism*);

8. wisata.....

8. wisata sejarah (*heritage tourism*);
9. wisata memorial (*dark tourism*);
10. wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
11. wisata pendidikan (*educational tourism*);
12. wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
13. wisata massal (*mass tourism*);
14. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
15. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
16. wisata alam (*nature-based tourism*);
17. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
18. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
19. wisata desa (*rural tourism*);
20. wisata luar angkasa (*space tourism*);
21. wisata olahraga (*sport tourism*);
22. wisata kota (*urban tourism*); dan
23. wisata relawan (*volunteer tourism*).

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Destinasi daya tarik wisata berbasis alam yaitu pada wilayah perairan laut dan daratan

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan

Kualitas.....

kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh : daya tarik Pantai Trikora ditambah dengan area kuliner, *sign and posting*, atraksi sinar dan suara (*son't et lumiere*), fasilitas *watersport* dsbnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh : Pantai Trikora ditambah dengan aktifitas minat khusus *watersport*, MICE dsbnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan
 - b. jaringan air bersih
 - c. jaringan telekomunikasi
 - d. sistem pengelolaan limbah
- yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

a.fasilitas....

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (*Early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (*money changer*);
 - c. fasilitas bisnis: kios kelontong dan obat 24 jam (*drug store*), warnet, telepon umum, *public locker*;
 - d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, *laundry*, dan tempat sampah;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak - anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak - anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
 - h. fasilitas lahan parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.
- Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e - tourism* kios;
 - d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
 - e. *souvenir shop*;
 - f. *tourism sign & posting* (*gate, interpretation board*, rambu lalu - lintas wisata); dan
 - g. *Landscaping*

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.....

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Yang dimaksud dengan tenaga pendidik adalah guru dan dosen

Pasal 37.

Cukup jelas

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

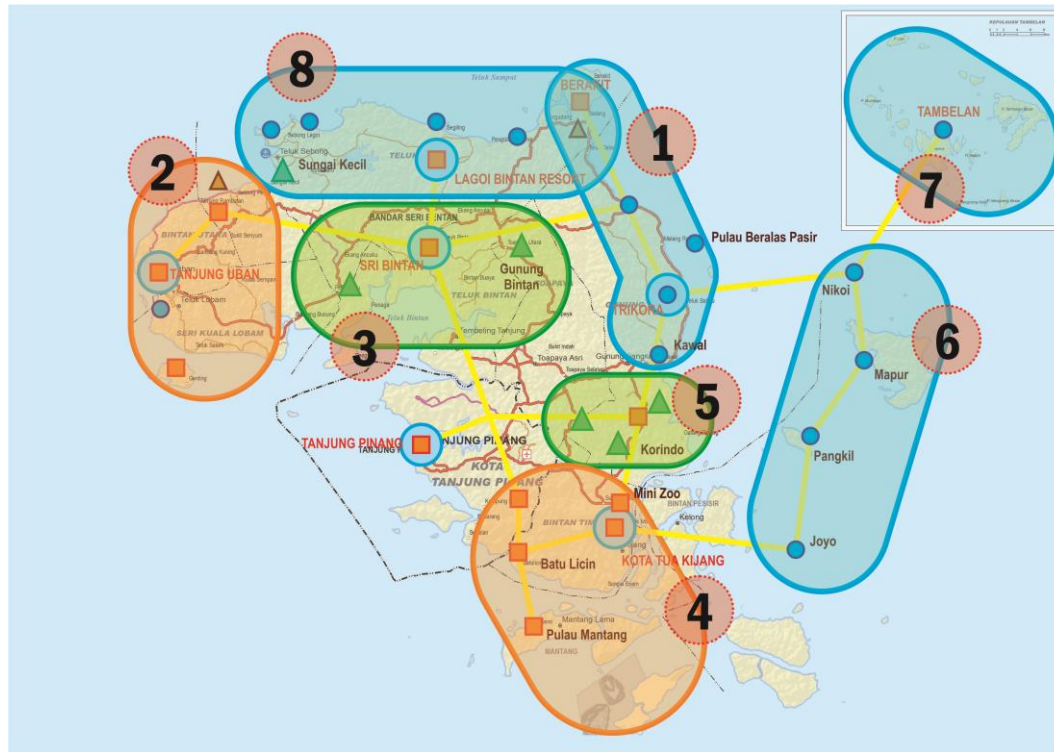
Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Nomor : 4 TAHUN 2015
Tanggal : 29 OKTOBER 2015



Peta Potensi perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten Bintan mencakup 8 (delapan) kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD), yang mencakup:

1. KPPD Trikora - Berakit dskt
2. KPPD Tanjung Uban – Kuala Lobam dskt
3. KPPD Gunung Bintan dskt
4. KPPD Kijang - BatuLicin dskt
5. KPPD Korindo dskt
6. KPPD Nikoi – Mapur dskt
7. KPPD Tambelan dskt
8. KPPD Lagoi dskt

Pj.BUPATI BINTAN
ttd

DOLI BONIARA

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 OKTOBER 2015

1.1. DESTINASI PARIWISATA

PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN

PEMBAGIAN KLASTER DAN CAKUPAN DAYA TARIK WISATA

NO	KLASTER	KOMPONEN DTW	KARAKTER PRODUK		Hub klaster (tourism base)	CAKUPAN WILAYAH ADMINSITRATIF
			Core product	Supporting product		
1	Klaster / KPPD LAGOI dskt	Resort Lagoi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus (MICE, Resort) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (Water Sport, Mangrove) 	Lagoi	Sebong Lagoi
2	Klaster/ KPPD TRIKORA – BERAKIT dskt	Pantai Trikora, Desa Nelayan Berakit, Ekowisata Mangrove Kawal, Bukit Kerang, Even-even Olahraga Internasional, TPI Kawal, Desa Wisata Pengudang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (Pantai, Mangrove, Water Sport) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya (Desa Wisata); ▪ Khusus (belanja, MICE, Festival dan Even, Desa Nelayan) 	Trikora	Toa Paya Asri Teluk Bakau Malang Rapat Berakit
3	Klaster/ KPPD KORINDO dskt	Ex Tambang Bauksit, Agrowisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (Danau eks Tambang, Agrowisata) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus (Theme Park) 	Kijang	Gunung Kijang
4	Klaster/ KPPD NIKOI – MAPUR dskt	Pulau Nikoi, Pulau Mangkil, Pulau Suka, Mapur, Pantai Beralas Bakau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (pantai, bahari), 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus (Resort, Private Resort) ▪ Budaya (Mapur) 	Trikora	Teluk Bakau Mapur
5	Klaster/ KPPD TAMBELAN dskt	Penangkaran Penyu, Pantai Pasir Putih, Makam Sultan Abdullah Muayyat Syah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (Pantai, Bahari) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya (religi, ziarah) ▪ Khusus (resort) 	Tambelan	Tambelan
6	Klaster/ KPPD KIJANG – BATU LICIN dskt	Museum eks Tambang, Mini Zoo, Kota Tua Pecinan Kijang, Kuliner, Festival dan Even Budaya, Seni dan Budaya Mantang, Gunung Lengkuas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya (living culture, sejarah, heritage) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alam (gunung, pantai) ▪ Khusus (kebun binatang, Even) 	Kijang	Gunung Kijang Gunung Lengkuas Mantang

NO	KLASTER	KOMPONEN DTW	KARAKTER PRODUK		Hub klaster (<i>tourism base</i>)	CAKUPAN WILAYAH ADMINSITRATIF
			<i>Core product</i>	<i>Supporting product</i>		
7	klaster/ KPPD GUNUNG BINTAN dskt	Desa Wisata Sri Bintan, Kota Bandar Seri Bintan, Gunung Bintan, Eco resort, Desa Wisata Sebong Pereh, Air Terjun Gunung Bintan, Festival dan Even Gunung Bintan, Mangrove Sungai Kecil	Alam (pegunungan, mangrove)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus (desa wisata, penelitian); ▪ Budaya (desa wisata, living culture) 	Bandar Sri Bintan	Bandar Sri Bintan Bintan Bunyu Gunung Bintan Sungai Kecil
8	klaster/ KPPD TANJUNG UBAN – LOBAM dskt	Pantai Sakera, Pantai Tanjung Uban, Ekowisata Kuala Lobam, Desa Wisata Kuala Lobam, Pantai Sungai Lepah	Alam (pantai, ekowisata, water sport)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khusus (MICE, kuliner, belanja) ▪ Budaya (even dan festival) 	Tanjung Uban	Tanjung Uban Kuala Lobam Busung

Pj.BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 OKTOBER 2015

RINCIAN INDIKASI PROGRAM, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN TAHAPAN SERTA SKPD PENANGGUNGJAWAB.

ISU: PENATAAN PERWILAYAHAN PARIWISATA YANG SINERGIS DAN TERPADU DENGAN POTENSI STRATEGIS SEKTOR LAIN YANG TERKAIT PERLU DIKEMBANGKAN									
SASARAN : MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
	Pengembangan ruang-ruang wisata tematis dalam tata hubungan yang sinergis, komplementer dan terpadu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata kabupaten bintang yang berdaya saing	1. Menyusun rencana pengembangan Ruang-ruang Wisata/ Sub-sub Kawasan Wisata Tematis yang terpadu sebagai kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten Bintan	1.1.1. Perencanaan KSPD/ Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan KPPD/ Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • KSPD Trikora - Berakit dskt • KPPD Tanjung Uban – Kuala Lobam dskt • KPPD Gunung Bintang dskt • KPPD Kijang Batu – Licin dskt • KPPD Korindo dskt • KPPD Nikoi – Mapur dskt • KPPD Tambelan dskt 				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum
		2. Menyusun rencana pengelolaan dan regulasi pembangunan kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD)	1.2.1. Pengembangan rencana tata kelola dan regulasi pembangunan kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD) dan KSPD Kabupaten Bintan					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum

A. DAYA TARIK WISATA

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan keragaman dan kualitas daya tarik wisata dalam rangka mendorong pemerataan dan daya saing kegiatan kepariwisataan kabupaten Bintan	1. Perintisan pengembangan daya tarik wisata berbasis alam (wilayah perairan laut dan daratan), budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even di kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) dan Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) untuk mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata setempat	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam rangka PERINTISAN PENGEMBANGAN untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan : <ul style="list-style-type: none"> daya tarik wisata : BUDAYA (TRADISI DAN PEDESAAN) daya tarik wisata : BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH/ HERITAGE daya tarik wisata : ALAM (HUTAN – GUNUNG – DANAU - MANGROVE) daya tarik wisata khusus : INDUSTRI , LIFESTYLE 	<ol style="list-style-type: none"> Gunung Bintan Sri Bintan Bandar Seri Bentan Kawal Sebong Lagoi Korindo Batu Licin Kijang Bukit Kerang Mantang Tanjung Uban Kuala Lobam Bandar Seri Bentan Mangrove Kawal Mangrove Sei Kecil 				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Industri Pariwisata
			<ol style="list-style-type: none"> Implementasi konstruksi dalam rangka PERINTISAN PENGEMBANGAN untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan 					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Investor	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas PU BLH

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Pembangunan daya tarik wisata berbasis alam (wilayah perairan laut dan daratan), budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan) daya tarik wisata dalam rangka PEMBANGUNAN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada : <ul style="list-style-type: none"> ▪ daya tarik wisata : KULINER DAN SHOPPING ▪ daya tarik wisata : BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH/ HERITAGE ▪ daya tarik wisata : ALAM (BAHARI : PANTAI – KEPULAUAN) 	a. Trikora b. Berakit c. Mapur d. Nikoi e. Beralas f. Tambelan g. Kijang				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas Pekerjaan Umum d. Industri Pariwisata
			2. Implementasi/ konstruksi dalam rangka PEMBANGUNAN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	a. Trikora b. Berakit c. Mapur d. Nikoi e. Beralas f. Tambelan g. Kijang				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Investor	a. Bappeda b. Dinas PU c. BLH

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		3. Pemantapan daya tarik wisata berbasis alam (wilayah perairan laut dan daratan), budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam rangka PEMANTAPAN untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas : <ul style="list-style-type: none"> ▪ daya tarik wisata : MICE DAN EVENT 	a. Lagoi b. Bandar Sri Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas PU d. Industri Pariwisata
			2. Implementasi konstruksi dalam rangka PEMANTAPAN untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	a. Lagoi b. Bandar Sri Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Investor	a. Bappeda b. Dinas PU c. BLH

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		4. Revitalisasi daya tarik wisata berbasis alam (wilayah perairan laut dan daratan), budaya, dan khusus/ konvensi, insentif, pameran, dan even dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.	1. Perencanaan (masterplan/ DED dan kajian kelayakan daya tarik wisata dalam rangka REVITALISASI untuk peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.	a. kawasan ex tambang Bauksit, Korindo dan Kijang b. Mini Zoo Kijang				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas PU d. Industri Pariwisata
			2. Implementasi konstruksi dalam rangka REVITALISASI untuk peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.	a. Kawasan ex tambang Bauksit, Korindo dan Kijang b. Mini Zoo Kijang				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Investor	a. Bappeda b. Dinas PU c. BLH
2.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu antar ruang-ruang pariwisata berkembang di Kabupaten Bintan	1. Pengembangan dan penguatan hubungan - keterkaitan (linkage) serta keterpaduan pengemasan pariwisata antar potensi ruang pariwisata di Kabupaten Bintan	1. Pengembangan jalur (travel pattern) dan paket wisata untuk segmen umum (mencakup : wisata alam , wisata budaya, wisata khusus) 2. Pengembangan jalur (travel pattern) dan paket wisata untuk segmen wisata minat khusus (special interent tourist)	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas Pekerjaan Umum d. Industri Pariwisata

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3.	Penguatan pelestarian sumber daya wisata di Kabupaten Bintan	1. Penguatan upaya pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi kehutanan, bentang alam, dan kelautan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan perlindungan sumber daya hutan di Bintan (termasuk ruang terbuka hijau, bentang alam spesifik, persawahan) 2. Konservasi – rehabilitasi kawasan kelautan yang telah rusak untuk mendukung kelestarian bentang alam Bintan 3. Kajian kelayakan dan perencanaan pengembangan sumber daya kelautan dan bentang alam untuk pengembangan pariwisata 4. Fasilitas perintisan pembangunan fasilitas dan daya tarik wisata kelautan di Bintan 5. Pengembangan system dan sarana prasarana keamanan dan keselamatan kegiatan pariwisata di wilayah pantai dan laut Bintan\ 	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pertanian dan Kehutanan • Dinas Kelautan dan Perikanan • Bappeda • Dinas PU • Dinas Pertambangan dan Energi g. Industri

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Penguatan pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi sumber daya energy dan sumber daya mineral (termasuk potensi ex tambang) untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan perlindungan potensi geologi dan sumber daya mineral di wilayah di Bintan 2. Kajian kelayakan dan perencanaan pengembangan potensi geologi dan sumber daya mineral serta ex tambang untuk pengembangan pariwisata 3. Fasilitas perintisan pembangunan fasilitas dan daya tarik wisata geologi dan sumber daya mineral serta ex tambang 4. Pengembangan sistem dan sarana prasarana keamanan dan keselamatan kegiatan pariwisata di wilayah potensi geologi dan sumber daya mineral serta ex tambang. 	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan, khususnya kawasan ex tambang Bauksit, Korindo dan Kijang				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas PU

ISU:									
<ul style="list-style-type: none"> • DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA • CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI • POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE). 									
SASARAN :									
<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN 2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA 									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		3. Penguatan pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) potensi/ sumber daya kebudayaan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan perlindungan potensi / sumber daya kebudayaan (cagar budaya, adat tradisi, kesenian) di Bintan 2. Kajian kelayakan dan perencanaan pengembangan potensi / sumber daya kebudayaan (cagar budaya, adat tradisi, kesenian) untuk pengembangan pariwisata 3. Fasilitas perintisan pembangunan fasilitas dan daya tarik wisata budaya (cagar budaya, adat tradisi, kesenian) 4. Pengembangan panduan dan model pelestarian sumber daya budaya dalam mendukung pengembangan kepariwisataan 	<p>Seluruh kawasan Kabupaten Bintan, khususnya desa-desa wisata dan kawasan Mantang</p> <p>Seluruh kawasan Kabupaten Bintan, khususnya desa</p> <p>Seluruh kawasan Kabupaten Bintan, khususnya desa</p> <p>Seluruh kawasan Kabupaten Bintan, khususnya desa-desa wisata dan kawasan Mantang</p>				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemkab b. Bappeda c. Dinas Koperasi d. Industri e. Padepokan seni f. Masyarakat
4.	Pengendalian dan penataan lingkungan di Bintan dalam mendukung kualitas daya tarik wisata	1. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat	1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang pembangunan kepariwisataan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemkab b. Bappeda c. Masyarakat

ISU:

- DOMINASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BINTAN YANG BERTUMPU PADA WISATA BAHARI PERLU DIIMBANGI DENGAN DIVERSIFIKASI DAYA TARIK WISATA YANG BERBASIS PADA BUDAYA DAN POTENSI ALAM LAINNYA
- CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI
- POTENSI-POTENSI STRATEGIS KEPARIWISATAAN YANG BELUM TAMPAK DAN MASIH PERLU DIELABORASI SERTA DIKEMBANGKAN LEBIH LANJUT (DIVING, SNORKLING, FISHING, DEEP SEA FISHING, KULINER, HERITAGE, MANGROVE, VILLAGE).

SASARAN :

1. MENINGKATNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA BINTAN
2. BERKEMBANGNYA DAYA TARIK WISATA MELALUI PERINTISAN, PEMBANGUNAN, PEMANTAPAN, DAN REVITALISASI DAYA TARIK WISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan/ pengembangan kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan perkembangan destinasi pariwisata Bintan	1. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan kawasan Bintan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
		3. Pengembangan dan Penerapan Perangkat Hukum dan Perangkat Pengaturan Teknis Pengembangan Sub-sub Kawasan Wisata Bintan	1. Penyusunan perangkat hukum dan aturan turunan / petunjuk teknis pengembang sub-sub kawasan wisata Bintan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
		4. Penguatan Kepedulian dan Pemahaman Masyarakat Luas Terhadap Rencana Pengembangan dan Penataan daya tarik wisata	1. Penyebarluasan sosialisasi dan pendampingan pembangunan kepariwisataan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					

B. AKSESIBILITAS DAN/ATAU TRANSPORTASI PARIWISATA

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan dan pematapan JARINGAN DAN PRASARANA transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	1. Pengembangan dan pematapan jaringan dan prasarana transportasi darat, angkutan penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara dalam memperkuat konektivitas antara pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata	1. Pengembangan dan pematapan jaringan dan prasarana transportasi darat penghubung antara pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Lingkar Barat Bintan Jalan Lingkar Timur Bintan 				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perhubungan Bappeda Swasta
			2. Pengembangan dan pematapan jaringan dan prasarana angkutan penyeberangan antar pulau	<ul style="list-style-type: none"> Tanjung Uban Bandar Bintan Telani Tanjung Berakit Kawal Sri Bayintan Kijang Tambelan 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Swasta
			3. Pengembangan serta pematapan fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang masuk Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Tanjung Berakit Tanjung Uban 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas PU Bappeda Swasta

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			4. Pengembangan serta peningkatan fungsi bandara Raja Haji Fisabillah sebagai gerbang masuk Bintan	<ul style="list-style-type: none"> bandara Raja Haji Fisabillah 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Swasta
			5. Penyelesaian dan optimalisasi fungsi bandara Busung sebagai pintu gerbang masuk Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Busung 					
		2. Pengembangan dan Peningkatan Kemudahan pergantian moda untuk mendukung kemudahan kunjungan dan pergerakan wisatawan di Bintan	1. Pengembangan dan Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda (terminal, rest area) transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Bintan, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan Jalan Lingkar Barat Jalan Lingkar Timur 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Swasta
		3. Pengembangan dan Peningkatan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Bintan	1. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan Jalan Lingkar Barat Jalan Lingkar Timur 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Swasta

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			2. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu (signage) di sepanjang koridor pergerakan wisata di Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan Jalan Lingkar Barat Jalan Lingkar Timur 				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perhubungan Bappeda Swasta
2.	Pengembangan dan pemantapan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan dan pengembangan kepariwisataan kawasan	1. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan, kapasitas, keamanan dan kenyamanan moda transportasi dalam meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan	1. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan darat 2. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan laut dan penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Lingkar Barat Bintan Jalan Lingkar Timur Bintan <ul style="list-style-type: none"> Bintan – Batam Bintan – Singapura Bintan – Malaysia Bintan – Tambelan Bintan – Pulau-pulau lainnya 				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Swasta
			3. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut, serta keamanan dan kenyamanan moda transportasi angkutan udara	Raja Haji Fisabillah Busung					

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Pengembangan dan pematapan kemudahan akses informasi, reservasi dan keterpaduan layanan moda transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan	1. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Bintan 2. Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum • Bappeda • Swasta

C. PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Bintan	1. Penyiapan dan Peningkatan Prasarana Umum (jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) di Bintan	1. Fasilitasi jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pengelolaan limbah dan sampah di Bintan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas PU • Dinas Kebersihan
			2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas PU • Dinas Kebersihan
			3. Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata.					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Bappeda • Dinas Kebersihan
		2. Pengembangan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Bintan	1. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi baru pengembangan pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Telkom	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2. Peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung komunikasi					Telkom	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Bappeda • Swasta
			3. Fasilitasi pengadaan akses internet di lokasi-lokasi / pusat kegiatan pariwisata					Dinas Perhubungan	
			4. Fasilitasi pengadaan akses internet di lokasi-lokasi / pusat kegiatan pariwisata					Dinas Perhubungan	

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		3. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasum, dan faspar	1. Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			2. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Koperasi
2.	Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata	1. Pengembangan dan Penerapan Berbagai Skema Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta (public private partnership)	1. Pengembangan regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pekerjaan Umum • Bappeda
			2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata						<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Bappeda • Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pengembangan dan Penerapan Berbagai Skema Kemandirian Pengelolaan	1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Koperasi • Bappeda • Swasta

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintang • Dinas Pekerjaan Umum • Bappeda • Swasta
			3. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata dengan mengangkat ciri lokal Bintang					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Koperasi • Bappeda • Swasta
		3. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (difable)	1. Evaluasi kualitas dan ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (difable)	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintang				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Pemkab Bintang • Bappeda
			2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang					Pemkab Bintang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Bintang yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	1. Pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Bintang	1. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Bintang dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintang				Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Pemkab Bintang • Bappeda

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			2. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Bintan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
			3. Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
			4. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
4.	Pengembangan fasilitas pariwisata (pusat informasi wisata, akomodasi, rumah makan, pusat cinderamata, dsb) untuk mendukung pertumbuhan kegiatan wisata dan kelancaran aktifitas wisatawan	1. Perencanaan, pengembangan dan penetapan regulasi dalam rangka pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung kepariwisataan	1. Pengembangan fasilitas rumah makan dan akomodasi;	<ul style="list-style-type: none"> • Trikora • Kawal • Kijang • Batu Licin • Bandar Seri Bentan • Tanjung Uban • Berakit 			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Koperasi • Bappeda • Swasta 	
			2. Pengembangan fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (tourism information center),						
			3. Pengembangan toko cinderamata (souvenir shop);						
			4. Pengembangan penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu-lintas wisata (tourism sign and posting)		<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan • Jalan Lingkar Barat • Jalan Lingkar Timur 		Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Pemkab Bintan 	

ISU: CITRA PARIWISATA BINTAN YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DESTINASI YANG AMAN DAN NYAMAN SERTA FAMILY ORIENTED MASIH PERLU DI TINGKATKAN DAN DIPERKUAT MELALUI PENGEMBANGAN-PENGEMBANGAN DAYA TARIK, PENATAAN LANSEKAP, PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS, FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI									
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIFITAS, KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN BERWISATA MELALUI PENGEMBANGAN AKSES, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			5. Pengembangan rest area pada jalur-jalur dan lokasi strategis untuk mendukung kenyamanan perjalanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Bintang • Trikora • Korindo • Batu Licin 				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintang • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Koperasi • Industri • Swasta • Masyarakat

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

ISU : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINTAN YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA KESADARAN MASYARAKAT LOKAL AKAN MANFAAT PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumber daya komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Bintan	1. Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pendidikan • Dinas Koperasi • Industri • Institusi Pendidikan
			2. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan						
3. Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan									
		2. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dsb) 	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan					
2.	Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata	1. Mengembangkan usaha produktif di bidang pariwisata untuk peningkatan sumber daya lokal di Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata. 	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Koperasi • Bappeda • Pemerintah Desa • Swasta
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/ komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata. 						

ISU : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINTAN YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA KESADARAN MASYARAKAT LOKAL AKAN MANFAAT PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3.	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	1. Mengembangkan rantai nilai usaha masyarakat di bidang kepariwisataan di Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak – anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan. 	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pemkab Bintan Dinas Koperasi Bappeda Swasta

ISU : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINTAN YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA KESADARAN MASYARAKAT LOKAL AKAN MANFAAT PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing. Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan perlindungan. Koordinasi – integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM.) 						

ISU : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINTAN YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA KESADARAN MASYARAKAT LOKAL AKAN MANFAAT PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT MELALUI BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata. 						

E. INVESTASI PARIWISATA

ISU : PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
SASARAN : MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata	1. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
			2. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa						
		2. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi Penanaman Modal Asing di sektor pariwisata	1. Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi Penanaman Modal Asing	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
			2. Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha di sektor Pariwisata						
			3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak.						
			4. Pembuatan aturan – aturan operasional mengenai penanaman modal asing di sektor pariwisata						
2.	Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	1. Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
			2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata						

ISU : PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
SASARAN : MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja 2. Pengurangan jenis peraturan perijinan yang menghambat kemudahan investasi	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
3.	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	1. Mengembangkan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	Fasilitasi penyiapan informasi profil investasi Kabupaten Bintan	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Swasta
		2. Meningkatkan promosi investasi Bintan di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal 2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi Kabupaten Bintan 3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi kepariwisataan Kabupaten Bintan 4. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet 5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan. 6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia 7. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Swasta

ISU : PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
SASARAN : MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		3. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi 2. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Swasta
4.	Perbaiki iklim investasi di bidang pariwisata	Mengembangkan sistem birokrasi perijinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata	1. Pendirian lembaga perijinan terpadu di daerah terkait;	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
			2. Pembuatan sistem perijinan dengan SOP, SPP, dan mekanisme kerja yang jelas dan terukur di lembaga perijinan terpadu;						
3. Mempermudah/memperjelas birokrasi & peraturan di bidang kontrak tenaga kerja;									
4. Pelatihan pegawai perijinan untuk peningkatan kualitas pelayanan perijinan;									
5. Penyediaan peta investasi/prospektus sesuai dengan kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Prasaran Pariwisata di daerah terkait untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modal;									
		2. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Peninjauan ulang peraturan-peraturan daerah terkait yang berpotensi menghambat investasi di bidang pariwisata diikuti dengan penghapusan, pengubahan, atau pengurangan peraturan terkait	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta

ISU : PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
SASARAN : MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN, TERUTAMA TENTANG KEMUDAHAN REGULASI DAN KEAMANAN BERINVESTASI									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		3. Mengembangkan model pemberian insentif bagi penanaman modal di bidang pariwisata	1. Penetapan keringanan pajak dalam periode tertentu bagi investasi di bidang pariwisata;	Seluruh kawasan di Kabupaten Bintan				BKPM	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Swasta
			2. Pengurangan/restrukturisasi jenis PPh Badan bagi investor asing&lokal;						
			3. Pengurangan/restrukturisasi jenis PPn bagi investor asing&lokal;						

Pj. BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 OKTOBER 2015

II. PEMASARAN PARIWISATA

A. PASAR WISATA

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEGARA (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLUYAN EKSPLOKASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Pengembangan segmen pasar utama : Singapura , Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Inggris, Australia, Malaysia, Philipina, dan AS, dan segmen pasar potensial (Eropa : Jerman, Perancis, Belanda)	1. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar –pasar utama	1. Partisipasi Event promosi pariwisata di Singapura, Cina, Korsel, Jepang, India, dan Malaysia	Singapura, Cina, Korsel, Jepang, India, dan Malaysia				Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			2. Pencetakan Marketing Kit untuk didistribusikan di Lokasi-Lokasi Strategis seperti Mall, Bandara di Singapura dan Malaysia	Bintan, luar daerah, luar negeri (Singapura, Malaysia)				Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata setempat
			3. Pencetakan media promosi Out Door untuk diletakkan di pasar utama seperti Singapura, dan Malaysia	Luar negeri (Singapura, Malaysia)				Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEgara (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLUNYA EKSPLORASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			4. Pemanfaatan Media Promosi on line dan off line secara komprehensif dan terfokus (pembuatan web site khusus, advertorial, publikasi tematik event, obyek wisata, dsb)	Bintan				Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
		2. Promosi di pasar-pasar potensial di Eropa	1. Bekerjasama dan kontak informasi dengan perwakilan Indonesia (Reps Office, Kedutaan) di Eropa	Bintan, Lokasi promosi yang disasar				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata • Kemlu : KJRI/KBRI
			2. Mengikuti beberapa event Travel mart Khusus di Eropa misalnya untuk Ecotourism, Beach & Resort	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata • Kemlu : KJRI/KBRI

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEGERA (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLUYAN EKSPLOKASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			3. Kerjasama promosi dengan para pelaku usaha (Travel Agen, Tour Operator) di sumber-sumber pasar utama	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata
		3. Pengembangan co-marketing dengan travel related industries yang menjual paket outbound ke Bintan	1. Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan Singapura, Cina, Korsel, Jepang, India, dan Malaysia	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			2. Kerjasama promosi dengan para pelaku usaha (Travel Agen, Tour Operator) di sumber-sumber pasar utama	Lokasi promosi yang disasar				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
		4. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama dan pasar potensial	1. Studi Analisis Pasar Wisatawan di Bintan	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEgara (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLUNYA EKSPLORASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		5.	1.						
			2. Studi Sementasi Pasar Wisatawan di Bintan	Bintan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan 	
	Pengembangan niche market	6. Pengembangan Pemasaran pada Destinasi Tematik Untuk Segmen Niche Market	1. Mengikuti Wedding & Bridal Exhibition di Hong Kong, Cina, dan Korea untuk promosi pada segmen Honey mooners	Lokasi promosi yang disasar			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata 	
			2. Mengikuti beach & resort exhibition di Eropa	Lokasi promosi yang disasar (eropa)			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata 	
			3. Mengikuti Travel Mart untuk Adventure & Marine di Australia	Lokasi promosi yang disasar (Australia)			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata 	

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEgara (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLU NYA EKSPLO RASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			4. Holding Event MICE selain olah raga misalnya konferensi ekowisata, konferensi marine, dll	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata
			5.						
		7. Promosi dan Publikasi Untuk Kelompok Segmen Special Interest	1. Intensifikasi Promosi Penyelenggaraan Event Internasional kategori Sport Tourism : Balap Sepeda, Trathlon, Festival Layang-Layang	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Kementerian (Pusat) • Asosiasi/Industri Pariwisata
			2. Pencetakan Kit Promosi khusus Sport Tourism untuk publikasi yang akan dibawa ketika mengikuti berbagai Trade Show atau Travel Fair internasional	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata •
			3. Pencetakan Kit Promosi khusus Special Interest (Bintan Rest Area, Bintan Little China, Bintan Culture Paradise) untuk publikasi yang akan dibawa ketika mengikuti berbagai Trade Show atau	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata •

ISU:									
1. KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN DIDOMINASI WISATAWAN MANCANEGERA (80%) 2. STAGNASI PERTUMBUHAN PASAR WISATAWAN 3. LAMA TINGGAL WISATAWAN DI BINTAN MASIH RENDAH (KURANG DARI 2 HARI) 4. SEGMENT UTAMA HANYA WEEKENDERS DAN PERLUNYA EKSPLORASI PASAR YANG LEBIH LUAS 5. ADANYA NICHE MARKET UNTUK HONEYMOONERS, MICE, DAN SPECIAL INTEREST									
SASARAN :									
1. PEMANTAPAN (INTENSIFIKASI) PASAR WISMAN YANG DIUKUR DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI PASAR UTAMA : SINGAPURA , CINA, KOREA SELATAN, JEPANG, INDIA, INGGRIS, AUSTRALIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN AS 2. EKSTENSIFIKASI DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN, LAMA TINGGAL, DAN PEMBELANJAAN DARI SEGMENT PASAR POTENSIAL (EROPA : JERMAN, PERANCIS, BELANDA)									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			Travel Fair internasional						
			4. Publikasi dalam bentuk iklan / advertorial dengan beragam bahasa pada media gaya hidup di Singapura, Malaysia, Cina, Korea, Jepang, India, dan Australia	Lokasi promosi yang disasar			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat 	
			5. Penyelenggaraan FAM Trip untuk jurnalis atau travel agent ke bintang (dari negara-negara target pasar) supaya melakukan publikasi dan promosi atas perjalanannya ke Bintang	Bintan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat 	

ISU: JUMLAH WISNUS HANYA KURANG LEBIH 20% DARI TOTAL KUNJUNGAN WISATAWAN KE BINTAN									
SASARAN : PERLUNYA PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISNUS DAN PEMANTAPAN UNTUK SEGMENT WISNUS PADA KELAS MENENGAH - ATAS									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
2.	Pemantapan segmen domestik (high – mid – low)	2.1. Pengembangan Pemasaran pada Destinasi Tematik Untuk Segmen Mass Tourism (Domestik) : Bintan Culture Paradise, Bintan Seafood Paradise, Bintan Souvenir Paradise, Bintan Rest Area, Waterboom	1. Fokus Promosi Pada Segmen Keluarga melalui berbagai media : majalah gaya hidup, brosur, out door print	Bintan, Negara-Negara TUjuan Promosi				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat
			2. Community Marketing yang meitik beratkan pada segmen komunitas hobbies : motor club, mobil club, balap sepeda, dll	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat • Klub Hobbies
		2.2. Publikasi Dalam Rangka Meningkatkan Awareness : Sadar Wisata	1. General Promotion Baik Online Maupun Offline yang mengajak wisatawan domestik untuk datang ke obyek wisata	Bintan, Media Online, Media Massa Cetak				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat
			2. Penyelenggaraan event dengan melibatkan talent artist (lokal, nasional) di tempat-tempat wisata yang diminati wisnus	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat
		2.3. Pemberian Insentif Khusus untuk pasar wisatawan domestik	1. Voucher Tamasya (Hotel, Obyek Wisata, Paket Wisata, dll)	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Pelaku Usaha, Bank, Asuransi, dll)
			2. Kredit Wisata (travel now pay later)	Bintan, Daerah Lain di luar Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Bank, Asuransi, dll)

ISU:									
1. BRANDING PARIWISATA BINTAN (BREATHKING JOURNEY) PERLU DIIMBANGI DENGAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG LEBIH KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MEMPERKUAT POSITIONING BINTAN, AGAR MAMPU BERSAING DENGAN BATAM SERTA MEMILIKI KARAKTER YANG LEBIH UNGGUL									
2. WISATAWAN MEMBERIKAN PENCITRAAN PARIWISATA YANG 'BERBEDA' ANTARA BINTAN DENGAN BATAM									
3. BINTAN LEBIH MENCERMINKAN KARAKTER : SAFE, SPECIAL INTEREST, HIGH QUALITY, FAMILY ORIENTED HOLIDAY, SEHINGGA PERLU DIBANGUN PENCITRAAN DAN JABARAN PRODUK WISATA YANG RELEVAN									
4. DINAMIKA PASAR YANG SEMAKIN KRITIS (SMART TOURISTS), TERSEGMENTASI DAN PERKEMBANGAN IT PERLU DIANTISIPASI DENGAN INOVASI PRODUK BARU, SERTA PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN YANG LEBIH BERAGAM DAN EFEKTIF									
SASARAN :									
1. PERLUNYA PENCIPTAAN DAN PEMANTAPAN BRANDING IMAGE PARIWISATA BINTAN YANG LEBIH UNIK DAN SPESIFIK MENCERMINKAN NILAI DAN KARAKTER KHAS BINTAN									
2. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PENDUKUNG PROMOSI DAN MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3.	Pengembangan citra dan positioning	3.1. Intensifikasi Publikasi dan Promosi dengan Memanfaatkan Brand "Bintan Breath Taking Journey"	1. Memanfaatkan Brand dalam berbagai kegiatan / event dan publikasi termasuk ketika berpromosi di Luar Negeri sehingga Bintan semakin dikenal luas	Lokasi-Lokasi Promosi di Luar Negeri				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata
			2. Menyelenggarakan program-program khusus yang pada konsepnya adalah representasi dari Brand Bintan Breath Taking Journey yang diperuntukkan bagi wisman maupun wisnus : promosi khusus, cultural event, aneka festival dsb	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat
		3.2. Media Campaign Sebagai Strategi Memantapkan Positioning Bintan Sebagai Destinasi Wisata yang Spesifik	1. Publikasi offline yang mencakup : advetorial, community marketing, experiential marketing, FAM Trip	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat
			2. Penyelenggaraan aneka lomba dan festival dengan Tema Bintan Breathtaking Journey (baik untuk kalangan lokal, nasional, maupun internasional)	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat

- ISU:**
1. BRANDING PARIWISATA BINTAN (BREATHTAKING JOURNEY) PERLU DIIMBANGI DENGAN PENGEMBANGAN PRODUK YANG LEBIH KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MEMPERKUAT POSITIONING BINTAN, AGAR MAMPU BERSAING DENGAN BATAM SERTA MEMILIKI KARAKTER YANG LEBIH UNGGUL
 2. WISATAWAN MEMBERIKAN PENCITRAAN PARIWISATA YANG 'BERBEDA' ANTARA BINTAN DENGAN BATAM
 3. BINTAN LEBIH MENCERMINKAN KARAKTER : SAFE, SPECIAL INTEREST, HIGH QUALITY, FAMILY ORIENTED HOLIDAY, SEHINGGA PERLU DIBANGUN PENCITRAAN DAN JABARAN PRODUK WISATA YANG RELEVAN
 4. DINAMIKA PASAR YANG SEMAKIN KRITIS (SMART TOURISTS), TERSEGMENTASI DAN PERKEMBANGAN IT PERLU DIANTISIPASI DENGAN INOVASI PRODUK BARU, SERTA PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN YANG LEBIH BERAGAM DAN EFEKTIF

- SASARAN :**
1. PERLUNYA PENCIPTAAN DAN PEMANTAPAN BRANDING IMAGE PARIWISATA BINTAN YANG LEBIH UNIK DAN SPESIFIK MENCERMINKAN NILAI DAN KARAKTER KHAS BINTAN
 2. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PENDUKUNG PROMOSI DAN MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			3. Publikasi dalam bentuk outdoor print : stiker mobil, baliho di pelabuhan dan bandara, penciptaan aneka merchandise bertema Brand Bintan, dsb	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Masyarakat

ISU:									
1. BELUM ADA FORMAT KEMITRAAN PEMASARAN YANG SPESIFIK DI BINTAN									
2. PAKET-PAKET WISATA YANG DIJUAL OLEH PARA OPERATOR DARI LUAR NEGERI BELUM SECARA LUAS MELIBATKAN INDUSTRY PARIWISATA LOKAL DI BINTAN									
3. PERLUNYA MENCIPTAKAN KERJASAMA KEMITRAAN TERKAIT DENGAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA KE LUAR NEGERI									
SASARAN :									
PERLUNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN YANG TERPADU DAN SINERGIS ANTAR PELAKU									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
4.	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata dalam dan luar negeri	4.1. Intensifikasi Publikasi dan Promosi dengan Memanfaatkan Brand "Bintan Breath Taking Journey"	1. Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan Singapura, Malaysia, dan China	Bintan, Negara Mitra Promosi				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Airlines)
			2. Kemitraan dengan para travel agent dan tour operator yang menjual pariwisata Bintan di luar negeri (pada pasar-pasar utama dan pasa potensial wisman)	Bintan, Negara Mitra Promosi				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Swasta (Travel Agent, Tour Operator)
			3. Kemitraan dengan industri perbankan, institusi pendidikan, dalam rangka menggerakkan perjalanan wisatawan domestik I(mass tourism)	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • Institusi Pendidikan
		4.2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Regional	1. Memanfaatkan Badan Kerjasama Batam Bintan Karimun (BKK) sebagai bagian dari kemitraan di bidang promosi pariwisata	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • BKPM
			2. Memanfaatkan berbagai platform kerjasama seperti BIMP EAGA, SJORI ,ASEAN sebagai media kerjasama promosi regional	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata

ISU:									
1. BELUM ADA FORMAT KEMITRAAN PEMASARAN YANG SPESIFIK DI BINTAN									
2. PAKET-PAKET WISATA YANG DIJUAL OLEH PARA OPERATOR DARI LUAR NEGERI BELUM SECARA LUAS MELIBATKAN INDUSTRY PARIWISATA LOKAL DI BINTAN									
3. PERLUNYA MENCIPTAKAN KERJASAMA KEMITRAAN TERKAIT DENGAN PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA KE LUAR NEGERI									
SASARAN :									
PERLUNYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN YANG TERPADU DAN SINERGIS ANTAR PELAKU									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
			3. Menjalin kontak dan kerjasama dengan Singapura dan Malaysia	Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	• Asosiasi/Industri Pariwisata
			4. Memanfaatkan berbagai event travel mart atau pasar wisata nasional (TIME) sebagai wahana pengembangan kemitraan dan promosi pemasaran	Lokasi Penyelenggaraan Travel Mart				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	• Pemkab Bintan • Asosiasi/Industri Pariwisata • BKPM

Pj. BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 KTOBER 2015

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

ISU: PENATAAN KUALITAS, KAPASITAS, DAN DISTRIBUSI USAHA DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA MASIH PERLU DITINGKATKAN UNTUK MENINGKATKAN JEJARING DAN KINERJA MATA RANTAI KEGIATAN PARIWISATA YANG AKAN MENDUKUNG DAYA SAING KEPARIWISATAAN BINTAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS, KAPASITAS, DAN PEMERATAAN DISTRIBUSI USAHA DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA									
No	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Penguatan struktur usaha pariwisata	1. Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Industri Pariwisata di Kabupaten Bintan	1. Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata dalam bentuk asosiasi usaha pariwisata, seperti asosiasi daya tarik wisata, asosiasi usaha akomodasi, asosiasi usaha restoran dan rumah makan, asosiasi usaha transportasi, dll	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Pelaku Industri Pariwisata
			2. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					
			3. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					

ISU:									
a. POLA KEMITRAAN ANTARA KEPARIWISATAAN YANG BERBASIS PADA RESORT DAN KEPARIWISATAAN YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT MASIH PERLU DITINGKATKAN									
b. PEMANFAATAN PRODUK LOKAL SEPERTI: SAYURAN, DAGING, BUAH, BUNGA, IKAN DST TIDAK MAKSIMAL									
SASARAN :									
a. MENINGKATNYA KUALITAS KEMITRAAN ANTARA KEPARIWISATAAN YANG BERBASIS PADA RESORT DAN KEPARIWISATAAN YANG BERBASIS PADA MASYARAKAT									
b. MENINGKATNYA PEMANFAATAN PRODUK LOKAL SEPERTI: SAYURAN, DAGING, BUAH, BUNGA, IKAN DST DALAM USAHA KEPARIWISATAAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
2	Penguatan kemitraan usaha pariwisata	Mengembangkan Pola-pola Kerjasama Industri Lintas Sektordi Kabupaten Bintan	1. Penggunaan proporsi minimal sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Pelaku Industri Pariwisata
			2. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cinderamata khas daerah di hotel	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					
			3. Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					
			4. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					

ISU: KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK WISATA (FOOD AND BEVERAGE, AKOMODASI, PELAYANAN) MASIH MEMBUTUHKAN PENINGKATAN UNTUK Mendukung POSISINYA SEBAGAI DESTINASI YANG BERTARAF INTERNASIONAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA BERKELANJUTAN									
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK WISATA (FOOD AND BEVERAGE, AKOMODASI, PELAYANAN) YANG Mendukung POSISI BINTAN SEBAGAI DESTINASI YANG BERTARAF INTERNASIONAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SERTA BERKELANJUTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	Meningkatkan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata di Kabupaten Bintan	1. Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Pelaku Industri Pariwisata
			2. Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					
			3. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan					

ISU: KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PENAMBANGAN DAN INDUSTRI									
SASARAN : MENINGKATNYA KEPEDULIAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN BUDAYA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
4	Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan	1. Pengembangan pariwisata yang peduli lingkungan di Kabupaten Bintan	1. Pemanfaatan lahan bekas penambangan bauksit sebagai daya tarik wisata	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas PU • Pelaku Industri Pariwisata
			2. Penambahan aktivitas penanaman pohon bagi wisatawan dalam <i>mangrove tour</i>	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Dinas Kehutanan • Pelaku Industri Pariwisata
		2. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budayadi Kabupaten Bintan	1.2.1. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata, seperti penghijauan kembali, pengadaan fasilitas umum di obyek-obyek wisata, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, beasiswa bagi anak-anak sekolah berprestasi, dll	Seluruh kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Bintan • Pelaku Industri Pariwisata • Dinas-dinas terkait: Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dll

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 KTOBER 2015

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

ISU: PARIWISATA MENJADI SEKTOR ANDALAN DAN PENUNJANG PDRB TERBESAR BAGI BINTAN, SEHINGGA ORGANISASI/INSTITUSI DAN PRANATA YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN PERLU DIPERKUAT DAN DITINGKATKAN KUALIFIKASI DAN KUALITASNYA									
SASARAN : MENINGKATNYA STANDARISASI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta Di Bintan	1. Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui <i>Public- Private Partnership (PPP)/ Good Tourism Governance</i>	1. Pembentukan dan penguatan badan kepariwisataan untuk mawadahi para pelaku usaha pariwisata di Bintan (ASITA; HPI; GAHAWISRI; dll)	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
			2. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)Bintan						
		2. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	1. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan					
			2. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (pokdarwis)						
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak positif pengembangan pariwisata lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan									

ISU: REGULASI YANG MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN MASIH PERLU DIKUATKAN									
SASARAN : MENINGKATNYA STANDARISASI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
2	Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				BAPPEDA Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
			2. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan						
			3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik						

ISU: SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PELAKU DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MASIH PERLU DIPERKUAT									
SASARAN : MENINGKATNYA STANDARISASI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
3	Peningkatan Koordinasi Dan Kemitraan Antar Pelaku Di Bidang Kepariwisata	1. Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Kabupaten	1. Peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Bintan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				BAPPEDA Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
			2. Peningkatan alokasi anggaran pembangunan kepariwisataan dari semua pemangku kepentingan						

ISU: SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PELAKU DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MASIH PERLU DIPERKUAT									
SASARAN : MENINGKATNYA STANDARISASI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI BINTAN									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
		2. Optimalisasi Koordinasi Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan	1. Peningkatan koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				BAPPEDA Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
	2. Peningkatan koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan								
	3. Peningkatan koordinasi monitoring dan pengendalian program pembangunan terkait kepariwisataan								
		3. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat	1. Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
	2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata								

Lampiran VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
 Nomor : 4 TAHUN 2015
 Tanggal : 29 OKTOBER 2015

PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA

ISU: PARIWISATA MENJADI SEKTOR ANDALAN DAN PENUNJANG PDRB TERBESAR BAGI BINTAN, SEHINGGA SUMBER DAYA MANUSIANYA PERLU DIPERKUAT DAN DITINGKATKAN KUALIFIKASI DAN KUALITASNYA									
SASARAN : MENINGKATNYA DAYA SAING MUTU PELAYANAN MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIADI BIDANG PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
1.	Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bintan	1.1. Optimalisasi kualitas dan kapasitas SDM Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bintan	1.1.1. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata
			1.1.2. Program Pendidikan, bekerjasama dengan PTN/PTS yang mempunyai Jurusan Pariwisata untuk peningkatan mutu kualitas SDM pada Dinas Pariwisata Bintan (D2/D3/D4/S1/S2)						
			1.1.3. Program pelatihan pengembangan di bidang kepariwisataan (perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi)						
			1.1.4. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Luar Negeri						
2.	Sertifikasi SDM di Bidang Pariwisata di Bintan	2.1. Optimalisasi SDM Kepariwisata Di Bintan	2.1.1. Sertifikasi SDM Kepariwisata di Bidang Perhotelan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan • Industri Pariwisata
			2.1.2. Sertifikasi SDM Kepariwisata di Bidang Restoran						
			2.1.3. Sertifikasi SDM Kepariwisata di Bidang Objek & Daya Tarik Wisata						

ISU: PARIWISATA MENJADI SEKTOR ANDALAN DAN PENUNJANG PDRB TERBESAR BAGI BINTAN, SEHINGGA SUMBER DAYA MANUSIANYA PERLU DIPERKUAT DAN DITINGKATKAN KUALIFIKASI DAN KUALITASNYA																
SASARAN : MENINGKATKAN DAYA SAING MUTU PELAYANAN MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIADI BIDANG PARIWISATA																
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT							
					JP	JM	JPJ									
			2.1.4. Sertifikasi SDM Kepariwisata di Bidang Sektor Jasa													
			2.1.5. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Perhotelan													
			2.1.6. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Restoran													
			2.1.7. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Bidang Objek & Daya Tarik Wisata													
			2.1.8. Pelatihan dan Penataran SDM Kepariwisata di Sektor Jasa													
			2.1.9. Program magang (training program) kerjasama dengan industri pariwisata (resort)													
			2.1.10. Pengiriman pelaku pariwisata (perajin) ke destinasi pariwisata yang lebih maju (misal: Bali, Yogyakarta, Lombok, dll)													
			2.1.11. Pemberian bantuan modal/kredit lunak dan bantuan bahan baku													
			2.2. Sertifikasi Profesi Tenaga Pendidik (Guru Dan Dosen)							2.2.1. Sertifikasi tenaga pendidik di bidang kepariwisataan	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan • Industri Pariwisata
										2.2.2. Akselerasi kemampuan penelitian dan pengajaran tenaga pendidik S1 dan S2.						
2.2.3. Pengakuan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan lain (Waive of Certification)																

ISU:
PARIWISATA MENJADI SEKTOR ANDALAN DAN PENUNJANG PDRB TERBESAR BAGI BINTAN, SEHINGGA SUMBER DAYA MANUSIANYA PERLU DIPERKUAT DAN DITINGKATKAN KUALIFIKASI DAN KUALITASNYA

SASARAN :
MENINGKATKAN DAYA SAING MUTU PELAYANAN MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIADI BIDANG PARIWISATA

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					JP	JM	JPJ			
		2.3. Akselerasi kualitasTenaga pendidik kepariwisataan	2.3.1. Pemberian Beasiswa S2 dan S3 2.3.2. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di Institusi Pendidikan Pariwisata dan Perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan • Industri Pariwisata 	
3.	Standarisasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisataan	3.1. Mengembangkan dan mengoptimalkan institusi pendidikan Pariwisata	3.1.1. Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan 	
			3.1.2. Fasilitasi Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma							
			3.1.3. Pengembangan kurikulum Sekolah Vokasi Pariwisata untuk jenjang Menengah dan Diploma							
		3.2. Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	3.2.1. Kolaborasi Pemerintah dan Industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang)	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pendidikan
			3.2.2. Kolaborasi Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan institusi pendidikan							
			3.2.3. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di Institusi Pendidikan Pariwisata dan Perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar							

ISU: PERAN MASYARAKAT SEBAGAI TUAN RUMAH PARIWISATA YANG BAIK MASIH PERLU DIBERDAYAKAN DAN DITINGKATKAN									
SASARAN : MENINGKATNYA DAYA SAING MUTU PELAYANAN MELALUI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG PARIWISATA									
No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT
					JP	JM	JPJ		
4.	Optimalisasi Peran Masyarakat Di Sekitar Destinasi Pariwisata	4.1. Meningkatkan peran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	4.1.1. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis) 4.1.2. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis) 4.1.3. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Seluruh Kawasan Kabupaten Bintan				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Industri Pariwisata

Pj.BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA